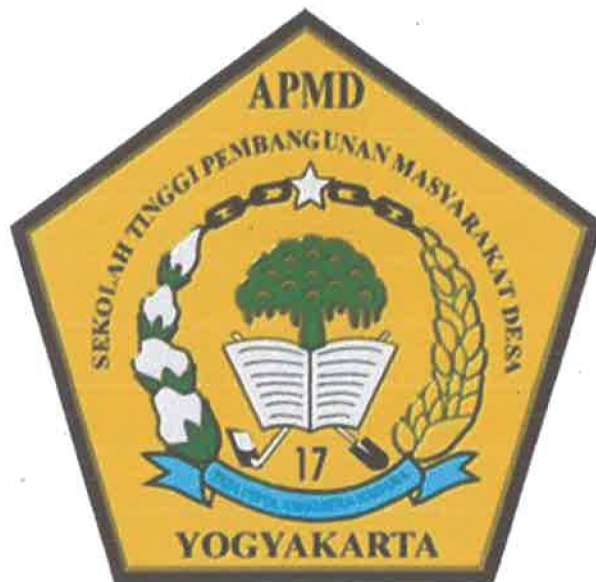


**PATOLOGI BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK DI
KALURAHAN KEDUNGKERIS KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN
GUNUNGGIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Disusun oleh :

**PITA YULIANA SIMANULLANG
20520022**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

2024



**PATOLOGI BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK DI
KALURAHAN KEDUNGKERIS KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN
GUNUNGKIDUL**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)
Program Studi Ilmu Pemerintahan



Disusun Oleh:

PITA YULIANA SIMANULLANG
20520022

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (S1)
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan diperhatikan di depan tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 6 Februari 2024

Waktu : 08.30 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

1. Ketua Penguji/Pembimbing
Dr. Rijel Samaloisa
2. Penguji Samping I
Analius Giawa, S.IP., M.Si
3. Penguji Samping II
Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si



Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos., M.Si

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pita Yuliana Simanullang

NIM : 20520022

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul **“PATOLOGI BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KALURAHAN KEDUNGKERIS KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL”** merupakan benar-benar karya tulis saya sendiri yang disusun sebagai salah satu kewajiban guna menyelesaikan jenjang Strata Satu di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Semua sumber data yang saya gunakan dalam penelitian ini telah saya cantumkan sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah. Apa bila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya kesamaan atau kecurangan dalam skripsi ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 7 februari 2024

Penulis,



Pita Yuliana Simanullang
20520022

MOTTO

“Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja”
(Keluaran 14:14)

“Uang itu nominalnya murah. Yang lebih mahal itu adalah Pengalaman”
(Pita Yuliana Simanullang)

“Selalu nikmati hidup dengan penuh syukur”
(Pita Yuliana Simanullang)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah terlibat dalam menggariskan tinta-tinta emas dalam buku catatan dan proses perjalanan yang sangat luar biasa yang telah terlalui, sehingga saya dapat menyelesaikan tulisan ini:

- ❖ Ucapan syukur dan Terimakasih yang sangat besar saya haturkan kepada Sang Pencipta Tuhan Yesus Kristus, bahwa sampai saat ini masih diberikan kesempatan untuk menikmati berkat dan cinta kasih yang luar biasa dalam hidup saya.
- ❖ Terimakasih saya ucapkan kepada kedua orang tua tercinta dan terkasih yang paling berjasa dalam hidup saya Bapak Sampe Tua Simanullang dan Ibu Rosmaida Manurung yang telah melahirkan, mendidik, dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang dan cinta kasih yang teramat besar sampai saat ini. Terimakasih telah menjadi orang tua yang sangat hebat dan kuat, serta donatur terbesar saya selama kuliah. Berkat doa, kepercayaan, support, dan semangat mereka saya bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang mahasiswi. Doa dan harapan saya, semoga selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang, kebahagiaan dan sukacita, serta kelancaran dalam setiap pekerjaan yang dilakukan.
- ❖ Terimakasih saya ucapkan kepada Kakak dan Abang (Henny Incelina Simanullang, Tuty Magdalena Simanullang, Rosa Matrona Simanullang) dan Abang (Roy Marulitua Simanullang) yang sangat saya sayangi dan cintai, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi di setiap proses yang dilalui selama menyelesaikan tugas ini. Serta menjadi donatur saya dalam setiap saat tenang maupun genting. Semoga suatu saat kita menjadi orang sukses dan menjadi kebanggaan orang tua dan berguna untuk banyak orang, bangsa dan negara.
- ❖ Terimakasih saya ucapkan kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya (Andianus S. Bosko S.I.Kom) terimakasih telah selalu setia menjadi rumah buat saya yang bukan hanya sekedar tanah dan bangunan. Yang telah berkontribusi banyak dalam proses perjalanan

penulisan skripsi ini, yang selalu hadir saat senang maupun susah menjadi partner untuk bertukar pikiran, belajar, serta selalu memberikan dukungan dan dorongan agar selalu semangat dalam situasi apapun. Doa terbaik untuk kita berdua, semoga apa yang diharapkan dan dicita-citakan dapat terwujud.

- ❖ Terimakasih saya ucapkan kepada adik-adik saya di Jogja yang saya sayangi, (Enjel, Gege, Ave, Reta) yang telah setia menemani dan kebersamai peneliti dalam menjalankan studi di Jogja. Tetap semangat dengan apapun yang terjadi. Semoga kalian menjadi orang sukses.
- ❖ Terimakasih saya ucapkan kepada teman-teman, sahabat, dan keluarga yang telah setia bersama-sama melewati suka-duka selama menjalankan studi di Yogyakarta. Walaupun suatu saat akan berpisah namun proses panjang yang telah terlewati akan menjadi kisah yang tidak akan bisa terlupakan.
- ❖ Terimakasih saya ucapkan kepada abang dan kaka saya di Yogyakarta (Bang Ipang, Kak Eka, Bang Darius, Kak Elen, Bang Tomi, Bang Bois) yang selalu memberikan motivasi serta bersama-sama menjalani kisah panjang selama di Yogyakarta.
- ❖ Terimakasih saya ucapkan kepada diri saya sendiri. Yang telah kuat, sabar, dan semangat dalam menjalankan studi di Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan kasih-Nya penulis bisa menuntaskan skripsi ini yang berjudul: “PATOLOGI BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK” (Studi Penelitian di Kalurahan Kedungkeris Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, DIY. dengan baik. Hasil karya ini merupakan satu persyaratan yang harus di penuhi untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan Kampus Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dengan demikian, pada kesempatan yang luar biasa ini, atas terselesaikannya peneliitian ini tentunya tidak terlepas dari restu, doa, ide/gagasan, serta bimbingan maupun saran yang mendorong penulis dalam proses penyusunan samapai terselesaikannya skripsi ini. Oleh sebab itu, dengan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Rijel Samaloisa selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sekaligus sebagai Dosen Pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu dan sabar dalam memberikan saran, arahan serta bimbingan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

3. Bapak Dr. RY. Gatot Raditya, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis dalam proses perkuliahan selama menempuh pendidikan di kampus Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
4. Segenap Dosen, Pegawai, dan Staff yang telah kebersamai penulis selama menjalankan pendidikan di kampus tercinta Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
5. Pemerintah Kelurahan beserta Masyarakat Kelurahan Kedungkeris yang telah memberikan kesempatan serta ruang bagi penulis untuk belajar sekaligus menggali ilmu berdesa, serta dengan sangat tulus kebersamai dan mensupport penulis dalam proses penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan belum sempurna. Dengan demikian, penulis berharap akan adanya suatu kritikan dan saran yang membangun untuk penulisan karya yang lebih baik dan berkualitas.

Yogyakarta, 01 Februari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Fokus Penelitian	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
1. Manfaat Akademis	11
2. Manfaat Praktis	11
3. Manfaat Bagi Penulis.....	11
F. Literatur Review	12
G. Kerangka Konseptual	15
1. Pengertian Birokrasi	15
2. Patologi Birokrasi	16
3. Desa	17
4. Pelayanan Publik.....	19
H. Metode Penelitian.....	20
1. Metode Pengumpulan Data.....	21
2. Metode Analisis Data.....	24
3. Metode Penyajian Data	26
BAB II PROFIL KALURAHAN KEDUNGKERIS	28
A. Sejarah Kalurahan	28

B. Geografis	30
C. Demografis	32
1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	32
2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	33
3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Rasio Ketergantungan	34
4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Wajib KTP	35
5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Akta Kelahiran	36
6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	36
7. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Akhir.....	38
8. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	40
D. Sosial Dan Ekonomi	41
E. Sosial Budaya	43
F. Sarana dan Prasarana.....	43
G. Pemerintah Kalurahan	45
H. Visi dan Misi	47
1. Visi Kalurahan	48
2. Misi Kalurahan	49

**BAB III TEMUAN LAPANGAN PATOLOGI BIROKRASI DALAM
PELAYANAN PUBLIK DI KALURAHAN KEDUNGKERIS KAPANEWON
NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA 51**

A. Mendukung Arah Peraturan Gubernur DIY No. 40 Tahun 2023 Tentang Reformasi Kalurahan.....	51
B. Mendukung Standar Pelayanan Publik Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009	53
1. Persyaratan.....	53
2. Sistem Mekanisme dan Prosedur	55
3. Jangka Waktu Layanan	56
4. Biaya/Tarif	56
5. Produk Pelayanan	58
6. Sarana, Prasarana atau Fasilitas	59
7. Evaluasi Kinerja Pelaksana.....	60

C. Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kalurahan Kedungkeris	60
1. Patologi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik: Berfokus Pada Standar Pelayanan Publik.....	61
3. Patologi Birokrasi Lingkungan Masyarakat Berfokus Pada Kotak Aduan Masyarakat Dan Survey Kepuasan Terhadap Pelayanan Pamong Kalurahan.....	69
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92
PANDUAN WAWANCARA	94
LAMPIRAN.....	96

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Informan	23
Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	33
Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	33
Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Rasio Ketergantungan.....	34
Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Wajib KTP	35
Tabel 2. 5 Jumlah Berdasarkan Kepemilikan Akta Kelahiran.....	36
Tabel 2. 6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	36
Tabel 2. 7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Akhir	38
Tabel 2. 8 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan.....	40
Tabel 3. 1 Penjelasan Ruang Lingkup Pergub DIY Nomor 40/2023	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Wilayah Administrasi Kalurahan Kedungkeris	32
Gambar 3. 1 Ruang Tunggu Kalurahan Kedungkeris	65
Gambar 3. 2 Pembukuan Pelayanan di Kalurahan Kedungkeris	80
Gambar 3. 3 Kegiatan BIMTEK Sistem Informasi Perencanaan Desa Tahun 2021	84
Gambar 3. 4 Balai Kalurahan Kedungkeris	86
Gambar 3. 5 Bagan Informasi Kalurahan Kedungkeris	86

ABSTRAK

Kalurahan Kedungkeris merupakan salah satu kalurahan yang berada di Kabupaten Gunungkidul yang memiliki lahan tanah yang luas dengan mayoritas mata pencaharian masyarakat adalah bertani dan beternak. Berdasarkan data yang diperoleh jumlah penduduk di Kalurahan Kedungkeris mencapai sebanyak 4.775 orang. Berkaitan dengan jumlah penduduk yang banyak tersebut tentunya melahirkan tanggung jawab yang besar dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang optimal di Kalurahan Kedungkeris. Dengan demikian hadirnya birokrasi pemerintahan dalam pelayanan publik sangat menentukan arah percepatan pelayanan yang efektif dan berkualitas. Namun, pada realita yang terjadi justru problematikan yang terjadi merujuk pada internal birokrasi pemerintahan yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Adapun rumusan masalah penelitian tentang Patologi Birokrasi dalam Pelayanan Publik di Kalurahan Kedungkeris Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sebagai subyek penelitiannya adalah pemerintah kalurahan, carik (sekretaris desa), jagabaya (kasi pemerintahan) tata laksana, tokoh masyarakat serta masyarakat umum. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Metode analisis data yang di lakukan peneliti adalah Deskriptif Kualitatif.

Hasil penelitian yang di dapatkan dari proses penelitian di lapangan menunjukkan bahwa situasi dan kondisi dalam penyelenggaraan pelayanan publik terhadap masyarakat sejauh ini baik. Hanya saja, yang menjadi induk permasalahannya justru terjadi dalam internal birokrasi pemerintah. Yang dimana mencatat bahwa, proses birokrasi pemerintah saat ini masih lemah dalam memahami tupoksi tugas dan fungsi, kualitas SDM yang lemah dalam birokrasi pemerintahan, tidak komitmen dalam pekerjaan karena fokus yang terbagi atas bisnis pribadi, melemahnya pengelolaan pelayanan publik dalam pemanfaatan teknologi informasi seperti website kalurahan yang tidak kelola dengan baik yang dibutikan dengan informasi maupun survey data yang belum terupdate dan tidak bisa diakses, serta lemahnya keterbukaan terhadap publik. Beberapa komponen di atas menjadi garis besar pokok masalah yang terjadi dalam birokrasi pemerintahan yang tentunya berpengaruh dalam proses pelayanan yang berkualitas dan akan berdampak pada terjadinya patologi birokrasi yang berkepanjangan apabila tidak segera dibenahi dan ditindaklanjuti.

Kata Kunci: Patologi Birokrasi, Pelayanan Publik

SUMMARY

Kedungkeris sub-district is one of the sub-districts in Gunungkidul Regency which has a large area of land and the majority of the people's livelihood is farming and animal husbandry. Based on data obtained, the population in Kedungkeris District reached 4,775 people. Due to this large population, it certainly gives rise to a big responsibility in improving the optimal quality of public services in Kedungkeris District. Thus, the presence of government bureaucracy in public services greatly determines the direction of accelerating effective and quality services. However, in reality what is happening is that the problems that occur refer to the internal government bureaucracy which has an impact on improving the quality of public services. The research problem formulation is about Bureaucratic Pathology in Public Services in the Kedungkeris Kapanewon Nglipar District, Gunungkidul Regency, Special Region of Yogyakarta.

In this research, researchers used descriptive qualitative research methods. The research subjects were the sub-district government, carik (village secretary), Jagabaya (head of government), administration, community leaders and the general public. The data collection methods used were observation, interviews and documentation. The data analysis method used by researchers is Qualitative Descriptive.

The research results obtained from the research process in the field show that the situation and conditions in the provision of public services to the community have so far been good. However, the main problem actually occurs within the government's internal bureaucracy. Which notes that, the current government bureaucratic process is still weak in understanding the main tasks and functions, the quality of human resources is weak in the government bureaucracy, there is no commitment to work because the focus is divided on personal business, the weakening of public service management in the use of information technology such as sub-district websites which is not managed well, as evidenced by information and survey data that has not been upgraded and cannot be accessed, as well as weak openness to the public. Some of the components above outline the main problems that occur in government bureaucracy which of course influence the quality service process and will have an impact on the occurrence of prolonged bureaucratic pathology if it is not immediately addressed and followed up.

Keywords: Bureaucratic Pathology, Public Services

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara yang memiliki pembukaan UUD 1945 yang merupakan bagian awal dari konstitusi negara. Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwasanya tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia untuk mensejahterahkan dan mecerdaskan kehidupan bangsa, dalam makna lain bahwa setiap negara wajib memenuhi kewajiban setiap negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik.

Didorong dengan semakin pentingnya dari peran pelayanan publik, dalam satu sisi serta melimpahnya persoalan yang mencekik pada sisi lain, isu tentang kinerja dari aparat pelayanan publik merupakan bagian isu teratas dan terpenting dalam reformasi administrasi publik dalam berbagai negara. Dengan demikian, kinerja dari pelayanan publik kerap ditransitkan terhadap pengukuran kinerja pemerintah. Namun hal demikian bukan suatu hal yang baru dan asing sebab pada dasarnya pelayanan publik merupakan tanggung jawab dari pemerintah.

Gejala pelayanan birokrasi pemerintah kelihatannya masih sangat belum mencerminkan perubahan dengan secara signifikan. Sebagian besar perilaku aparat birokrasi masih menonjolkan minimnya responsivitas, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pengemasannya. Gagasan reformasi yang mengharapkan

agar birokrasi dapat lebih berjiwa transparansi, jujur dan terbuka, serta lainnya masih sangat jauh dari harapan.

Pemahaman terkait sosok birokrasi sekarang ini masih menampilkan karakteristik patrimonial adalah realitas benang sejarah yang sangat perlu dipahami dan dicermati secara teliti. Kehadiran birokrasi di kehidupan masyarakat politik adalah merupakan *conditio sine qua non*. Namun, persoalannya yaitu sentralisasi dan konsentrasi peran birokrasi terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat dan negara. Berdasarkan situasi tersebut, birokrasi mewujudkan tidak fungsional dalam melayani kepentingan publik. Sementara, apabila diamati dari konteks hubungan kekuasaan, pada fondasinya birokrasi yaitu mata rantai yang mengaitkan pemerintah dengan rakyatnya. Secara mendasar, birokrasi dimaknai sebagai alat pemerintah yang bekerja untuk kepentingan masyarakat secara umum. Berdasarkan hal itu, tugas birokrasi yakni merealisasikan setiap kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kepentingan hidup masyarakat.

Mengulas birokrasi di negara ini, kelihatannya suatu topik yang sangat menarik untuk dipahami. Dengan demikian berdasarkan tumpuan awal bahwa birokrasi merupakan suatu institusi modern yang wajib ada dan harus dipahami dalam khazanah penyelenggaraan pelayanan publik (*public services*). Pemahaman dalam implementasi kinerja birokrasi merupakan salah satu bukti kuat masyarakat dalam menilai bagaimana kesungguhan birokrasi. Akan tetapi, perlu digarisbawahi bahwa sekalipun birokrasi dipercaya sebagai komponen pelayanan publik, namun tidak ada yang mampu menjamin wujud topeng bisa berubah menjadi wujud yang menyeramkan, seperti monster ataupun harimau,

yang ganas dan menerkam yang pada akhirnya berpotensi menyengsarakan publik.

Patologi birokrasi dalam pelayanan publik merujuk kepada konflik ataupun gagasan yang terjadi dalam suatu sistem birokrasi atau administrasi pemerintahan yang secara umum mempengaruhi efektivitas serta efisiensi pelayanan publik. Pada dasarnya birokrasi dimaksudkan dalam suatu sistem pengaturan, pelaksanaan tugas-tugas administratif secara tidak langsung bertujuan untuk memenuhi kebutuhan publik. Akan tetapi, pada kenyataannya patologi birokrasi berpotensi dalam menghambat pencapaian tujuan serta mampu memperburuk suatu masalah yang terjadi. Dalam hal ini beberapa sebagai contoh dari patologi birokrasi dalam pelayanan publik diantaranya korupsi, prosedur yang rumit, lambat dan bertele-tele, penyalahgunaan wewenang, diskriminasi, tidak transparan, tidak berkualitas dalam memberikan pelayanan yang tepat waktu dan nyaman, serta adanya terjadinya suap dalam proses pelayanan publik. Berangkat pada kehidupan sehari-hari, sering sekali ditemukan masalah yang serupa di setiap instansi pemerintahan dalam memberikan akses layanan kepada masyarakat, yang secara tidak disadari sangat berakibat fatal dalam aspek kehidupan masyarakat umum yang dimana mengakibatkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah serta mempengaruhi ketidakpuasan terhadap pelayanan publik yang diberikan. Sehingga, penting untuk mencegah serta memahami patologi birokrasi dalam pelayanan publik bertujuan supaya dalam peristiwa ini pemerintah mampu hadir dalam memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan, demi mewujudkan kesejahteraan pelayanan publik.

Pelayanan publik merupakan salah satu kunci utama dalam menjaga stabilitas dan kualitas kehidupan masyarakat. Pada dasarnya, pelayanan publik menyangkut pada aspek yang sangat luas. Sebagai pemerintah, dalam kehidupan bernegara berfungsi dalam memberikan pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat, baik itu pelayanan berbasis aturan, atau bahkan pelayanan-pelayanan lainnya bertujuan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat pada bidang kesehatan, pendidikan, serta administrasi.

Selaras dengan itu, setiap badan pemerintahan berserta segenap jajarannya dan kebijakan, atau bahkan pelayanan publik harus mengedepankan hak asasi manusia serta menghormati sesama dan peka terhadap kehidupan masyarakat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan serta prioritas masyarakat publik. Dengan demikian, dalam kenyataan rakyat sebagai “sang penerima pelayanan”, dengan jajaran birokrasi sebagai “sang pelayanan”. Berangkat dari konsep tersebut berpotensi dalam mengubah konsepsi klasik dan tradisional dalam status kelembagaan pemerintahan. Pelayanan publik dapat dimaknai suatu pelayanan dalam sektor publik yang dijalankan oleh aparatur pemerintah dalam bentuk implementasi penyediaan barang, maupun jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam suatu wilayah.

Bagian penting dan terutama dalam instansi pemerintah adalah sebagai perangkat yaitu pemberi pelayanan. Berangkat dari definisi tersebut seharusnya dalam pelaksanaan kewajiban dalam menyediakan serta memberikan jasa pelayanan dari berbagai instansi pemerintah terhadap masyarakat, namun dalam kenyataannya, sering sekali ditemukan di lapangan bahwa setiap layanan yang disediakan dalam instansi pemerintahan pasti

memiliki drama dalam artian masalah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai petugas penyedia pelayanan. Dan hal serupa seperti ini sudah menjadi penyakit, bahkan penyakit secara umum di negara Indonesia, dalam melemahnya penyediaan pelayanan publik yang optimal, efisien, dan efektif. Bahkan situasi demikian sudah sangat lumrah terjadi di negara ini, dan membudaya dalam setiap wilayah terhadap kehidupan masyarakat.

Selanjutnya, dipahami bahwa pada umumnya dalam setiap negara juga sering terpeleset menerapkan pelayanan yang berkualitas, sehingga, kemudian menimbulkan masalah baru juga serius dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang nyata. Salah satu masalah utama yang disoroti adalah tentang patologi birokrasi, yang merujuk pada disfungsi dalam sistem birokrasi pemerintahan yang menggambarkan berbagai masalah atau penyimpangan yang terjadi dalam suatu birokrasi termasuk dalam pelayanan publik, yang mengganggu efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.

Menurut P. Sondang Siagian (1994:35-81) secara umum patologi birokrasi adalah penyakit dalam birokrasi negara yang muncul akibat perilaku para birokrat dan kondisi yang membuka kesempatan untuk itu, baik menyangkut politis, ekonomi, sosial kultural, dan teknologikal. Gejala patologi dalam birokrasi, berasal dalam lima masalah pokok yaitu: persepsi gaya manajerial para pejabat di lingkungan birokrasi, rendahnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional, tindakan pejabat yang melanggar norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, manifestasi dalam perilaku birokrat yang bersifat

disfungsi atau negatif, serta akibat konflik internal dalam berbagai instansi dalam lingkungan pemerintahan.

Selaras dengan itu, patologi birokrasi dapat diartikan suatu hal yang memahami berbagai penyakit yang melekat dalam birokrasi, sehingga mengalami disfungsi. Patologi birokrasi itu sama halnya dengan sebuah penyakit yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan dalam birokrasi. Penyakit ini bukan penyakit yang datang secara tiba-tiba melainkan sudah ada dan terpelihara sejak lama.

Lantas mengapa Patologi Birokrasi itu bisa muncul? Patologi Birokrasi itu muncul dikarenakan karena terjadinya struktur birokrasi yang terlalu berlebihan. Seperti, rantai hirarki yang panjang, spesialisasi, formalisasi dan kinerja birokrasi yang tidak linear. Klasifikasi patologi birokrasi diantaranya terdapat, paternalistik, pembengkakan anggaran, prosedur yang berlebihan, pembengkakan birokrasi, dan fragmentasi birokrasi.

Patologi birokrasi melibatkan berbagai aspek yang mengganggu fungsi dan kinerja sistem birokrasi pemerintah diantaranya, seperti, tindakan korupsi, nepotisme, tindakan tidak rasional, pertentangan kepentingan, pilih kasih, birokrasi yang lamban, pelayanan yang berbelit-belit, takut pada perubahan, takut mengambil keputusan, sifat menyalahkan orang lain, penggemukan biaya, serta kurangnya komunikasi, dan lainnya. Dengan demikian, dari berbagai aspek tersebut tentu dampaknya sangat beragam, mulai dari ketidakpuasan masyarakat, hilangnya kepercayaan terhadap lembaga pemerintah, hingga pada penyalahgunaan sumber daya publik.

Sehingga, sampai saat ini patologi birokrasi telah menjadi penyakit kronis dalam pelayanan publik. Sebagai contoh yang lumrah terjadi adalah antrian panjang di kantor pemerintah, terjadinya pungutan liar, takut terhadap perubahan, serta ketidaksesuaian prosedur yang seringkali menghalangi masyarakat untuk mendapatkan akses yang layak dalam pelayanan publik yang seharusnya diterima.

Sehubungan dengan itu, agar terciptanya pemerintahan yang mampu menjalankan fungsinya sebagai petugas pelayanan membutuhkan suatu kebijakan yang dimana mengatur tentang suatu pelayanan publik. Oleh sebab itu, pemerintah menetapkan dan membuat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sebagaimana tujuan dimuatnya undang-undang ini agar menyampaikan kepastian hukum kepada setiap pihak penyelenggara pelayanan publik maupun terhadap masyarakat.

Oleh sebab itu, adapun jenis-jenis pelayanan publik yakni di antaranya pelayanan administratif, pelayanan barang dan pelayanan jasa. Dalam pelayanan administratif dimaksudkan bahwa pelayanan yang memperoleh berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat publik, seperti, status kewarganegaraan, kompetensi, berkas kepemilikan pribadi terhadap suatu barang, dokumen-dokumen penting lainnya antara lain KTP (kartu tanda penduduk), akte kelahiran, akte pernikahan, serta akte kematian. Selanjutnya dalam pelayanan barang dimaksudkan suatu pelayanan yang memperoleh berbagai jenis/bentuk yang dikonsumsi publik seperti, akses jaringan internet, listrik dan air bersih. Terakhir dalam pelayanan jasa

dimaksudkan suatu pelayanan yang dibutuhkan oleh khalayak publik seperti pelayanan kesehatan, pendidikan.

Kalurahan Kedungkeris Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kalurahan yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Kedungkeris saat ini dipimpin oleh lurah yang bernama Bapak Rusdi Martono, S.Pd. mayoritas mata pencaharian masyarakat Kedungkeris adalah bertani dan beternak. Kalurahan kedungkeris memiliki 7 dusun yaitu: Kedungkeris, Pringsurat, Kwarasan Tengah, Sendowo Kidul, Sendowo Lor, Kwarasan Wetan, dan Kwarasan Kulon. Kalurahan Kedungkeris memiliki jumlah kepala keluarga kurang lebih 1.500 KK. Dengan demikian secara umum, tugas, dan tanggung jawab serta kewajiban pemerintah untuk tanggap terhadap kehidupan masyarakatnya sangat besar dan banyak tuntutan. Sehingga dengan demikian hadirnya pemerintahan yang mengedepankan layanan publik yang optimal sangat diutamakan dan diprioritaskan oleh publik.

Selaras dengan itu, kondisi dan situasi instansi pemerintahan sangat menentukan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Salah satu bagian tolak ukurnya dari aspek pelayanan. Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintahan Kalurahan Kedungkeris sangat berpengaruh terhadap keakuratan data dan kehidupan masyarakat. Dengan demikian posisi pelayanan Kalurahan Kedungkeris saat ini masih dalam proses penyempurnaan terlepas dari berbagai kekurangan yang ada, dikarenakan pelayanan yang disediakan masih belum secara sempurna teraplikasikan secara optimal di lapangan. Pergumulan yang sering ditemukan dalam suramnya kinerja pelayanan yang disediakan yang secara lumrah terjadi di kalangan pemerintahan yaitu pelayanan yang masih

bertele-tele dan cenderung birokratis, terjadinya sikap angkuh dari penyedia pelayanan, diskriminatif dan sederetan persoalannya, serta takut terhadap perubahan serta terjadinya gap dalam lingkungan masyarakat.

Secara umum, problematika demikian timbul karena terjadinya hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang bersifat renggang yang bisa timbul karena adanya provokator dari pihak lain yang notabene kontra pemerintah, dan memang merupakan karakter pemerintah dan pemerintahan yang arogansi, acuh tak acuh, sehingga menimbulkan problematika besar baik dalam internal maupun eksternal, yang kemudian mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, yang kemudian menimbulkan kecurigaan dari masyarakat kepada pemerintah yang merujuk negatif dalam menjalankan roda pemerintahan.

Selaras dengan itu, pemerintah di Kalurahan Kedungkeris juga membiaskan pelayanan publik berbasis offline dan online meskipun pada kenyataannya saat ini akses layanan online di Kalurahan Kedungkeris masih belum *terupgrate* secara umum, sehingga banyak orang yang kemudian kesulitan dalam mendapatkan informasi tentang kondisi di Kalurahan Kedungkeris.

Penelitian ini berangkat dari Perspektif Governace, yang dimana mampu mengeksplorasi peran sistem pengelolaan, kebijakan publik, serta regulasi dalam mengatasi masalah birokrasi yang mempengaruhi pelayanan publik. Governace hadir sebagai suatu pintu gerbang dalam memahami dan mempelajari tentang tata kelola pemerintahan ataupun manajemen dalam

pemerintahan, sehingga berkaitan dengan masalah patologi birokrasi yang menggerogoti sendi-sendi birokrasi dalam kehidupan pemerintahan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengambil posisi baru dalam mengkaji fenomena patologi birokrasi dalam pelayanan publik.

Berdasarkan belakang masalah tersebut, sangat penting dan perlu untuk mengangkat isu ini sebagai sebuah tulisan karya ilmiah dengan judul penelitian “Patologi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Bagaimana Patologi Birokrasi Pelayanan Publik di Kalurahan Kedungkeris?”

C. Fokus Penelitian

1. Patologi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik.

Pada Focus Ini Berkaitan Dengan Aspek Standar Pelayanan Publik

2. Patologi Birokrasi Dalam Internal Pemerintahan.

Aspek pada focus ini tentang:

- a. Maklumat Pelayanan
- b. Kode Etik di Lingkungan Pamong Kalurahan

3. Patologi Birokrasi Lingkungan Masyarakat.

Pada Fokus ini menyangkut aspek:

- a. Kotak Aduan Masyarakat
- b. Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pamong Kalurahan

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah, adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis patologi birokrasi dalam pelayanan publik di Kalurahan Kedungkeris.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor patologi birokrasi dalam pelayanan publik di Kalurahan Kedungkeris.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini untuk memberikan evaluasi atau catatan kritis patologi birokrasi dalam pelayanan publik di Kalurahan Kedungkeris. Selain itu, hasil penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai acuan atau bahan referensi bagi peneliti berikutnya yang tertarik dengan penelitian mengenai patologi birokrasi dalam pelayanan publik di Kalurahan Kedungkeris.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan secara praktis penelitian ini dapat memberi masukan kepada pihak terkait untuk lebih memperhatikan kepemimpinannya khususnya dalam patologi birokrasi pelayanan publik.

3. Manfaat Bagi Penulis

Melatih kemampuan berfikir dalam menganalisis patologi birokrasi dalam pelayanan publik di Kalurahan Kedungkeris.

F. Literatur Review

Pada umumnya, penelitian tentang patologi birokrasi dalam pelayanan publik bukanlah sesuatu yang baru. Penelitian-penelitian yang terdahulu telah berupaya dalam mnegungkapkan adalah sebagai berikut:

Pertama, Jurnal Governance and Politics yang dilakukan oleh Djamil Hasim, yang berjudul “Patologi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik”. Volume 3 No 1 tahun 2023. Dengan Metode Deskriptif kualitatif. Tulisan ini berisi tentang patologi birokrasi dalam pelayanan publik merupakan suatu masalah yang kompleks dan memerlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan para peneliti untuk mengatasi masalah tersebut. Birokrasi yang lambat, korupsi, dan ketidaktransparan dapat menghamban pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan, serta mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan merusak legitimasi institusi pemerintah.

Kedua, Jurnal Journal of Government Insight yang dilakukan oleh Sitti Ammas, Hasran, Bachtiar, A. Fitriani, yang berjudul “Patologi Birokrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan di Takalar”. Volume 3, Nomor 1/ ISSN 2789-7418. Dengan Metode Deskriptif kualitatif. Tulisan ini berisi tentang bahwa pada umumnya kinerja birokrasi dalam menjalankan pelayanan publik pada tingkat kecamatan di Kabupaten Takalar dinilai belum maksimal. Bahkan terdapat kesenjangan informasi berupa masyarakat tidak mengetahui prosedur dan tata cara pelayanan, serta responsivitas aparat terhadap berbagai keluhan yang dialami oleh pengguna layanan”.

Ketiga, Jurnal Peqguruang: Conference Series yang dilakukan oleh Rinawati Rinawati, Muhammad Syaeba, Ahmad Saleh, yang berjudul “Patologi

Birokrasi Dalam Pelayanan Administrasi Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa”. Volume 2, Nomor 2 Tahun 2020. Dengan Metode Deskriptif kualitatif. Tulisan ini berisi tentang patologi birokrasi dalam pelayanan administrasi di dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten mamasa masih tergolong tidak cekatan dan mutu pelayanan yang rendah, kurang disiplin (*indicipline*), pelayanan.berbelit- belit, serta sikap aparatur yang tidak responsif”.

Keempat, Jurnal Pegguruang: Conference Series yang dilakukan oleh Rinawati Rinawati, Muhammad Syaeba, Ahmad Saleh, yang berjudul “Patologi Birokrasi Dalam Pelayanan Administrasi Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa”. Volume 2, Nomor 2 Tahun 2020. Dengan Metode Deskriptif kualitatif. Tulisan ini berisi tentang patologi birokrasi dalam pelayanan administrasi di dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten mamasa masih tergolong tidak cekatan dan mutu pelayanan yang rendah, kurang disiplin (*indicipline*), pelayanan.berbelit- belit, serta sikap aparatur yang tidak responsif”.

Kelima, Jurnal Ilmu Pemerintahan yang dilakukan oleh Hamirul Hamirul, yang berjudul “Patologi Birokrasi Yang Dimanifestasikan Dalam Perilaku Birokrat Yang Bersifat Disfungsional”. Volume 7, Nomor 1 Tahun 2017. Dengan Metode Perbandingan Kualitatif dan Kuantitatif. Tulisan ini berisi tentang “Hasil penelitian di Kantor Pertanahan Kota Cimahi dalam melayani publik masih menderita jenis patologi birokrasi yang dimanifestasikan dalam perilaku birokrat yang bersifat disfungsional atau negatif, diantaranya:

tidak disiplin, berpura-pura sibuk, bersekongkol dan bekerjasama dengan calo, arogansi”.

Keenam, jurnal yang dilakukan oleh Yusnalia Yusnalia, yang berjudul “Studi Patologi Birokrasi Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kantor Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya”. Volume 6, Nomor 1 Tahun 2019. Dengan Metode Deskriptif Kualitatif. Tulisan ini berisi tentang “beberapa masyarakat di Kantor Kecamatan Jekan Raya mengeluhkan bahwa masih terdapat pelayanan yang berbelit-belit dan eksistensi birokrasi juga masih sangat rendah”.

Ketujuh, Community Development Jurnal dilakukan oleh Kiki Rizki Ramadhan, Lukmanul Hakim, Indra Aditya, yang berjudul “Patologi Birokrasi Dalam Pelayanan Administrasi E-Ktp Di Kelurahan Malaka Sari”. Volume 4, Nomor 2 Tahun 2023. Dengan Metode Perbandingan deskriptif Kualitatif. Tulisan ini berisi tentang “Pelayanan Administrasi e-KTP di Kelurahan Malaka Sari belum maksimal dan ditemukan patologi birokrasi dalam pelayanan administrasi e-KTP, dengan pelayanan yang berbelit-belit, dan lambat.

Kedelapan, Jurnal Ilmu Sosial dilakukan oleh Muhammad, yang berjudul “Patologi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Di Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Haulussy Kota Ambon”. Volume 15, Nomor 2 Tahun 2021. Dengan Metode deskriptif Kualitatif. Tulisan ini berisi tentang bahwa segala bentuk pelayanan masih bersifat diskrimatif serta respon yang masih lambat”.

Kesembilan, Jurnal Prosiding Nasional dilakukan oleh Nur Holifah, Novita Maulida Ikmal, Lutfia Nurul Hidayati, yang berjudul “Patologi Birokrasi Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Tinjauan Terhadap Fenomena “Pungli

Anggaran Pembangunan”)). Volume 1, Nomor 1 Tahun 2023. Dengan Metode deskriptif Kualitatif. Tulisan ini berisi bahwa sering terjadi ketidaksesuaian antara proposal pengajuan dengan laporan di lapangan. Sehingga berakibat menimbulkan permasalahan anggaran”.

Kesepuluh, Jurnal Of Politic and Government Studies yang dilakukan oleh D.N Purwandri, dan R.Martini yang berjudul “Patologi Birokrasi Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang”. Volume 2, Nomor 2 Tahun 2013. Menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Tulisan ini berisi tentang ketidakselarasan dalam menjalankan aturan birokrasi dan masih bnayaknya pegawai yang minim dengan pemahaman patologi birokrasi, sehingga dengan sadar atau tidaknya perilaku patologi birokrasi terjadi dengan membudaya”.

Berangkat dari pandangan kajian peneliti sebelumnya, peneliti mencoba mengambil posisi baru dalam melakukan kajian patologi birokrasi dalam pelayanan publik. Terdapat kesamaan dari kajian peneliti sebelumnya dengan peneliti saat ini dimana keterkaitan topik yang dibahas pada umumnya sama. Dan pada posisi perbedaannya terletak pada bagaimana pola pikir dalam mengkaji patologi birokrasi dalam pelayanan publik dengan pintu masuk kajian menggunakan perspektif governance, serta peneliti mencoba merangkum dalam merumuskan masalah dengan menghadirkan solusi dalam kajian penelitian.

G. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Birokrasi

Menurut Max Weber Birokrasi seharusnya dijalankan dalam sistem hirearki vertikal yang ketat dan komunikasi antar pekerja yang terbatas.

Layaknya mesin yang memiliki suku cadang yang berbeda fungsi, maka sistem birokrasi harus dirancang. (Remaja et al. 2023)

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1984), birokrasi dimaksudkan untuk mengorganisasi secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang. (Emanratu 2020)

Berdasarkan definisi di atas, birokrasi merupakan suatu bentuk sistem pemerintahan yang berhubungan dengan hukum dan memiliki control atau kekuasaan dalam suatu organisasi pemerintahan. Sehingga, apa kaitannya dengan topik peneliti? Kaitan dengan topik peneliti adalah meilihat bagaimana posisi birokrasi dalam menjalankan proses pemerintahan yang terorganisasi atau terstruktur.

2. Patologi Birokrasi

Menurut Prof. Dr. Sondang P Siagian, MPA., (1988) patologi birokrasi adalah penyakit dalam birokrasi negara yang muncul akibat perilaku para birokrat dan kondisi yang membuka kesempatan untuk itu, baik menyangkut politis, ekonomi, sosial kultural, dan teknologikal. (M. Ma'ruf 2010)

Menurut Risman K. Umar (2002) mendefinisikan bahwa patologi birokrasi merupakan suatu penyakit atau bentuk dari perilaku birokrasi yang menyimpang dari nilai-nilai etis, aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku dalam birokrasi.(Silalahi 2020)

Menurut Taliziduhu Ndraha, Miftah Thoha, Peter M. Blau, David Osborne, JW Schroom, patologi birokrasi merupakan penyakit, perilaku negative, atau penyimpangan yang dilakukan pejabat atau Lembaga birokrasi dalam rangka melayani publik, melaksanakan tugas, dan menjalankan program pembangunan. (Marwiyah 2023)

Berdasarkan definisi di atas, patologi birokrasi merupakan suatu penyakit dalam birokrasi yang berakibat fatal dalam keberlangsungan suatu perkumpulan atau organisasi pemerintahan atau dalam arti lain patologi birokrasi merupakan suatu penyakit yang merusak sendi-sendi dalam birokrasi. Pendapat di atas memiliki keterkaitan dengan topik peneliti tentang patologi birokrasi dalam pelayanan publik, hal tersebut dapat dibuktikan dengan maraknya penyakit birokrasi dalam suatu organisasi pemerintahan, baik secara global maupun dalam organisasi pemerintahan terendah yang notabene lebih dekat dengan masyarakat desa. Dengan patologi birokrasi peneliti mampu meninjau dan melihat sejauh mana pengaruh dari perilaku penyakit birokrasi dalam menjalankan suatu sistem pemerintahan.

3. Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah persatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat. (Barniat 2019)

Hadirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan wujud baru dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di

Indonesia. Salah satu tugas utama dari lembaga pemerintahan Indonesia dalam negara demokrasi adalah menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan yang telah dilegitimasi oleh masyarakat dan dalam hal ini adalah melaksanakan berbagai bentuk fungsi pelayanan terdiri dari pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan atau pemberdayaan masyarakat.

Menurut Maulidia (2014:40) menyatakan bahwa desa diberikan kepada desa kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan dan juga mengatur tentang kepentingan masyarakat setempat. Lebih lanjut, Maulidia mengatakan bahwa dalam pengaturan dan pengelolaan tentang desa disamping didasarkan kepada peraturan perundang-undangan berlaku juga harus memperhatikan hak asal-usul dan hak tradisional dari desa setempat.

Pandangan di atas secara historis pemerintah Indonesia mengakui dan menghormati keberadaan desa dan hak asal-usul secara tradisional dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia sehingga dalam pengaturan tentang desa juga harus memperhatikan hak asal-usul dan hak masyarakat setempat.

Berdasarkan pengakuan tersebut, desa memiliki tugas dan kewajiban dalam mengurus urusan rumah tangganya sendiri sebagaimana dalam bab 4 kewenangan desa pasal 18. Kewenangan desa meliputi, kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa.

4. Pelayanan Publik

Menurut Mahmudi (2010:223), pelayanan publik merupakan segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Heryanto Monoarfa 2012)

Menurut Harbani Pasolong (2007:128) pelayanan publik merupakan setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. (Anggit Saputro and Permadi Mulajaya 2022)

Menurut Sinambela dalam buku "Reformasi Pelayanan Publik" (2014:5) menyatakan bahwa pelayanan publik merupakan suatu bentuk pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara.(Village and Cloud 2019)

Berdasarkan defenisi di atas tersebut, pelayanan publik dapat diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan ataupun perilaku manusia secara fisik maupun non fisik dalam pelayanan secara umum baik itu kesehatan, pendidikan, dan lainnya, bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarkat dan memastikan bahwa kepentingan umum terpenuhi. Kaitannya dengan topik penelitian adalah sebagai terobosan peneliti dalam memahami dan menanggapi situasi secara langsung dalam standar pemenuhan kebutuhan pelayanan.

Bahwa pelayanan publik adalah salah satu tolak ukur jalannya roda pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dalam konteks ini, pemerintahan adalah pemerintahan desa sebagai pelaksanaan atau penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan kewenangan desa sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa Kalurahan Kedungkeris memiliki hak dan kewenangan untuk memberikan pelayanan publik pada masyarakat Kedungkeris.

Dalam hal ini, Pemerintah Kalurahan Kedungkeris dalam memberikan pelayanan dengan tujuan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memfasilitasi pembangunan desa, dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa yang mencakup dari beberapa aspek pelayanan:

a. Pelayanan Administratif

- 1) Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Perkawinan).
- 2) Penerbitan surat-surat administratif (Kartu Keluarga, KTP, dan Surat Keterangan Kependudukan).
- 3) Pelayanan Sosial (Penyediaan bantuan sosial bagi penduduk yang membutuhkan). Contohnya; PKH, KIP, dan lain sebagainya.
- 4) Pengolahan Data dan Informasi Desa.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Yang dimana peneliti lebih mengarah pada pendeskripsian secara perinci serta mendalam yang berkaitan pada kondisi maupun proses, serta langkah atau hal

pokok yang ditemukan pada sasaran suatu penelitian. “Melalui penelitian kualitatif peneliti mampu mengenali dan memahami subyek, merasakan apa yang dialami dalam rutinitas setiap hari. Peneliti kualitatif terlibat dalam suatu RW konteks situasi dan fenomena alami seseuai dengan yang dialami sebagaimana dalam setiap fenomena merupakan suatu hal yang unik dan berbeda dengan lainnya karna berbeda konteks”, (Basrowi & Suwandi, 2008:2)”.

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan salah satu cara yang dilakukan peneliti dalam menggali informasi terkait topik penelitian yang ditentukan. Dalam konteks ini peneliti mengangkat topik tentang “Patologi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik di Kalurahan Kedungkeris Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunungkidul”. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang sesuai dan memenuhi standar penelitian. Beberapa Langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam mendapatkan informasi data sebagai berikut:

- a) **Observasi Mendalam;** merupakan salah satu cara yang dilakukan dengan langkah mengamati atau biasa disebut pengamatan secara sistematis terhadap suatu fenomena ataupun subyek yang akan diteliti. Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara observasi mendalam partisipan. Dalam hal ini peneliti juga terjun langsung dalam kehidupan pemerintahan dan masyarakat melalui kebijakan kampus dengan diberlangungkannya program KKN bagi mahasiswa dengan tujuan memahami dinamika dalam pemerintahan dan masyarakat serta berlanjut dengan kunjungan lanjutan seusai

masa KKN serta dilaksanakan dengan adanya penelitian lanjutan di lapangan. Dengan demikian dapat lebih memahami, mengamati, dan mendalami terkait konteks kehidupan sosial masyarakat dan dinamika yang terjadi dalam proses pelayanan publik di Kedungkeris.

- b) **Wawancara Mendalam;** merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh peneliti dengan menyampaikan pertanyaan secara langsung maupun tidak langsung. Namun, akan lebih efektif apabila metode ini dilakukan secara tatap muka atau berinteraksi secara langsung dengan informan, karena akan lebih dapat memahami serta dapat menilai jawaban yang diterima atas pertanyaan yang disampaikan melalui mimik wajah, dan gagasan yang diberikan.

Dengan demikian peneliti telah melakukan wawancara berdasarkan ide, gagasan, dan komentar dalam proses wawancara yang berlangsung, dan akan menjadi data primer untuk peneliti dalam memahami bagaimana interaksi maupun hubungan antara pemerintah dengan masyarakat di Kalurahan Kedungkeris dalam menanggapi segala persoalan yang terjadi. Berangkat dari pelaksanaan wawancara peneliti juga tidak terlepas dari konsep panduan wawanra, akan tetapi proses wawancara yang dilakukan sebisa mungkin akan didesain dengan santai dan tidak terlalu forma, agar tidak terasa monoton dan membosankan, dan akan terasa mengalir dalam memantik keterbukaan informan untuk menyampaikan perspektif, pandangan, dan penilaian dari setiap persoalan yang ada yang berkaitan dengan topik penelitian.

Tabel 1. 1 Data Informan

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Usia
1	RusdiMartono, S.Pd	Kepala Desa	S1	40 Thn
2	Rohmat Yulyanto	Carik	SLTA	36 Thn
3	Suharto	BPD	Sarjana Muda	63 Thn
4	Heri Sudiarto	Kasih Pemerintahan	SMK	43 Thn
5	Sugiatrri	Tata Laksana	SMA	48 Thn
6	Paimin	Masyarakat	SD	50 Thn
7	Kasilan	Masyarakat	SMP	48 Thn
8	Bagas Triwibawa	Masyarakat	SMK	24 Thn
9	Nur Widayat	Masyarakat	SMU	48 Thn
10	Muhammad S. A	Masyarakat	SMK	31 Thn
11	Supeni	Masyarakat	SMA	52 Thn
12	Marsila	Masyarakat	SMK	43 Thn
13	Tri Suparni	Masyarakat	SMP	34 Thn
14	Sarwiningsih	Masyarakat	SMA	53 Thn
15	Putri	Masyarakat	SMK	19 Thn

Sumber: Hasil Wawancara di Kalurahan Kedungkeris 2024

- c) **Dokumentasi**; merupakan salah satu cara yang dilakukan peneliti dengan pengumpulan sumber data berdasarkan arsip foto, video, jurnal ataupun arsip dokumen penting yang telah dilaksanakan. Dokumen diartikan sebagai suatu catatan peristiwa yang telah terjadi. Bentuk-bentuk dari setiap dokumen yang sudah di kumpulkan dalam penelitian ini meliputi;
- Dokument Kelembagaan Pemerintahan.
 - Gambar seperti foto, peta dan lain sebagainya.

Termuatnya dokumen dukumen tersebut dapat memberikan terobosan yang selaras dengan data dan informasi yang dikumpulkan dari hasil observasi dan wawancara.

2. Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis data deskriptif kualitatif, sehingga data yang sudah dikumpulkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian diruraikan dengan bahasa verbal yang selanjutnya dapat ditarik kesimpulan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Yang dimana peneliti lebih mengarah pada pendeskripsian secara rinci serta mendalam yang berkaitan pada kondisi maupun proses, serta langkah atau hal pokok yang ditemukan pada sasaran suatu penelitian. “Melalui penelitian kualitatif peneliti mampu mengenali dan memahami subyek, merasakan apa yang dialami dalam rutinitas setiap hari. Analisis data dapat dilakukan dengan proses pemantauan, penelusuran, yang optimal, transkrip wawancara, pencatatan kegiatan di lapangan, serta data lainnya yang disajikan selama melaksanakan proses penelitian.

a. Obyek Penelitian

Obyek Penelitian merupakan suatu langkah yang paling penting dalam suatu perencanaan penelitian. Karena point ini merupakan suatu fokus ataupun topik yang diteliti dalam suatu studi ataupun penelitian yang kemudian ingin dipelajari lebih lanjut yang dapat berkaitan dengan makhluk hidup, konsep, atau fenomena sosial dan alamiah. “Point ini juga bisa di maknai sebagai suatu nilai dari tempat penelitian yang diteliti” (Supriati, 2012:38).

Penelitian ini akan dilakukan di Kalurahan Kedungkeris, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan salah satu wilayah yang mayoritas mata

pencahariannya adalah petani dan peternak. Berangkat dari situasi dan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana patologi birokrasi dalam pelayanan publik di Kalurahan Kedungkeris.

b. Subyek Penelitian

Subyek Penelitian merupakan sesuatu yang menjadi unsur sumber penelitian atau informan, ataupun sasaran yang berhubungan dengan sesuatu problematika yang menjadi topik penelitian. Subjek penelitian juga dapat diartikan dengan memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan (Arikunto, 2016:26).

Berdasarkan penjelasan di atas terkait dengan subyek penelitian, dalam konteks penelitian tentang Patologi Birokrasi dalam Pelayanan Publik terdiri dari pemerintah kalurahan, carik, jagabaya, tata laksana, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum. Penjelasan lebih rinci terkait informan sudah dicantumkan dalam tabel 1.1. Data Informan.

Menurut Miles dan Huberman (1984; 21-23) terdapat tahapan dalam kegiatan analisis data kualitatif yaitu:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dimaksudkan yaitu seperangkat informasi yang diberikan kepada peneliti untuk dapat menarik kesimpulan ataupun tindakan lanjutan. Sehingga seluruh data yang sudah diperoleh selama proses pelaksanaan penelitian dari hasil wawancara, observasi, yang kemudian dapat menumbuhkan deskripsi

tentang patologi birokrasi dalam pelayanan publik di Kalurahan Kedungkeris.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu kegiatan ataupun proses seleksi, pemusatan, atau pemfokusan dari segala informasi yang menguatkan data penelitian yang sudah didapatkan serta dicatat selama dilaksanakannya proses penelitian di lapangan.

c. Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan sebagai suatu proses penyusunan informasi yang dapat memperoleh kesimpulan yang kemudian dapat diaplikasikan dalam bentuk narasi singkat, bagan atau sejenisnya.

d. Penarik Kesimpulan

Penarik Kesimpulan diartikan sebagai suatu proses akhir dari setiap prosedur atau bagian. Penarikan kesimpulan didapatkan dari data yang telah dianalisis dan data yang sudah dicrosscheck kembali berdasarkan data riil dan data terupdate di lapangan. Dengan demikian peneliti dapat mengambil kesimpulan tentang bagaimana patologi birokrasi dalam pelayanan publik di Kalurahan Kedungkeris.

3. Metode Penyajian Data

Dalam penelitian ini, secara umum data yang diperoleh dan disajikan dengan narasi, dan gagasan yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan pandangan kritis di lapangan oleh peneliti. Digarisbawahi arti dari narasi dalam hal ini dimaknakan sebagai strategi peneliti dalam menyampaikan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan berdasarkan

perspektif ataupun pengalaman yang menciptakan pemikiran kritis dalam memahami patologi birokrasi dalam pelayanan publik di Kalurahan Kedungkeris. Selain dari itu, peneliti juga mencantumkan dan menyajikan suatu data temuan dalam bentuk tabel. Selain itu, peneliti juga menyajikan data temuan dalam bentuk tabel, dan gambar yang telah dikumpulkan.

BAB II

PROFIL KALURAHAN KEDUNGKERIS

A. Sejarah Kalurahan

Kedungkeris dari kata *kedhung* dan *keris*. *Kedhung* itu kumpulan kata dari sekumpulan air dari segala arah. Biasanya *kedhung* itu luas dan dalam. *Keris* itu pusaka tradisional Jawa yang mempunyai filosofi yang agung. Keris itu melambangkan kekuatan, kebijaksanaan dan keberanian membela kejelekan. Asalnya sendiri di ambil dari desanya Ki Lurah Semar di cerita wayang. Desa yang tertata, tertiti, tentram dan sejahtera, desa yang menjadi impian siapa saja karena kerukunan warganya. *Kedung keris tumarutis* punya arti tempat perkumpulan air yang dibutuhkan semua makhluk hidup. Harus mempunyai kekuatan, kebijaksanaan dan bersama-sama menciptakan keadaan yang tertib, tenteram sejahtera untuk segala sesuatunya. Seperti halnya wilayah desanya tokoh semar yang ada di dunia pewayangan.

Berangkat dari sejarah, Kalurahan Kedungkeris terdiri atas 7 padukuhan, sebagai berikut:

1. Padukuhan Kwarasan Tengah
2. Padukuhan Kwarasan Kulon
3. Padukuhan Kwarasan Wetan
4. Padukuhan Pringsurat
5. Padukuhan Kedungkeris
6. Padukuhan Sendowo Kidul
7. Padukuhan Sendowo Lor

Perlu untuk dipahami bahwa Kalurahan Kedungkeris merupakan salah satu wilayah yang memiliki lahan pertanian yang luas. Kalurahan Kedungkeris juga memiliki sejarah kepemimpinan yang terus terjadi perguliran sejak tahun 1916 hingga saat ini. Ada pun perguliran kepemimpinan yang terjadi sebagai berikut:

1. Noyo Tani (25 Tahun) (Periode 1916-1941)
2. Atmo Partiko (5 Tahun) (Periode 1941-1946)
3. Atmaredjo (3 Tahun) (Periode 1946-1949)
4. DJaenal (16 Tahun) (Periode 1949-1965)
5. Suhadji (4 Tahun) (Periode 1965-1969)
6. Suratman (Pj. Kades) (6 Tahun) (Periode 1969-1975)
7. Suwarno (24 Tahun) (Periode 1975-1999)
8. Bagasto (6 Tahun) (Periode 1999)
9. Sarjana, SE. (14 Tahun) (Periode 1999-2013)
10. Murdiyanto (6 Tahun) (Periode 2013-2019)
11. Rusdi Martono S.Pd (Periode 2019-Sekarang)

Perguliran masa kepemimpinan di Kalurahan Kedungkeris saat ini sudah terjadi sejak tahun 1916 hingga saat ini. Dan sudah terjadi sebanyak 11 kali perguliran kepemimpinan. Berdasarkan penelitian di lapangan serta berdasarkan data sejarah kalurahan menunjukkan belum yang memberikan pengakuan tentang kualitas pemerintah yang menciptakan kemajuan di Kalurahan Kedungkeris secara optimal. Namun, pada masa kepemimpinan Bapak Murdiyanto, SE berusaha dan semangat dalam “Menjadikan Desa Kedungkeris Modern dan Berbudaya” bersama masyarakat, Kepala Desa

Murdiyanta menjadi salah satu yang memulai proyek tersebut wisata berbasis “Sungai dan Hutan” yang tidak dapat dipungkiri mempunyai potensi yang besar dan yang paling terlihat di Kedungkeris. Sungai Oya terkenal dengan pembukaannya. Peradaban di Gunungkidul dan keadaan hutan perhutani digarap dengan tekun oleh Pemerintah Desa dan masyarakat untuk dijadikan tempat wisata alam. Dan Menjadi Cyber Village yang kokoh dan diperkuat oleh budaya dan potensi lokal menjadi impian yang tidak semua bisa diwujudkan karena kemiskinan 6 tahun sebagai kepala desa. Kemudian pada pemilu serentak 2019, Murdiyanta digantikan oleh Rusdi Martono, SE yang sampai saat ini masih berusaha merintis kebaruaran. Dan dengan niat membangun desa yang “berbudaya dan religius, pada tahun 2022 Kalurahan Kedungkeris berhasil meraih dan mewujudkan beberapa impian untuk kemajuan Kalurahan Kedungkeris dengan mendapatkan warna penghargaan, diantaranya, Juara 1 Lomba Kehormatan, Juara 1 Karang Taruna, Juara Satu Hati PKK.

B. Geografis

Kalurahan Kedungkeris merupakan sebuah kalurahan di Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Kedungkris ini terdiri dari 7 dusun yaitu Pringsurat, Kedungkeris, Sendowa Lor, Sedowo Kidul, Kwarasan Kulon, Kwarasan Tengah dan Kwarasan Wetan. Dengan jumlah penduduk Kalurahan yaitu sebanyak 4.775 jiwa. Wilayah Kalurahan Kedungkeris mempunyai keadaan geografis berupa pegunungan, ladang, sungai dan hutan, dengan luas 1.061,8 Ha. Terdiri dari Sawah 11,0 Ha, Lahan Pertanian 274,7 Ha, Bangunan 172,7 Ha, Hutan Rakyat 15,0 Ha, Hutan Negara 483,0 Ha, dan Hutan Negara seluas 105,4 Ha.

Secara geografis setiap dusun di Kedungkeris dipayungi hutan, yang sering disebut hutan negara. Oleh karena itu, keadaan tersebut menjadikan Kalurahan Kedungkeris kaya akan lahan luas, yang tentunya sangat berpotensi sebagai sumber ekonomi masyarakat kalurahan, serta peran dari masyarakat juga sangat berpotensi sebagai pengelola pengembangan hutan negara tersebut. Berdasarkan data yang ditemukan.

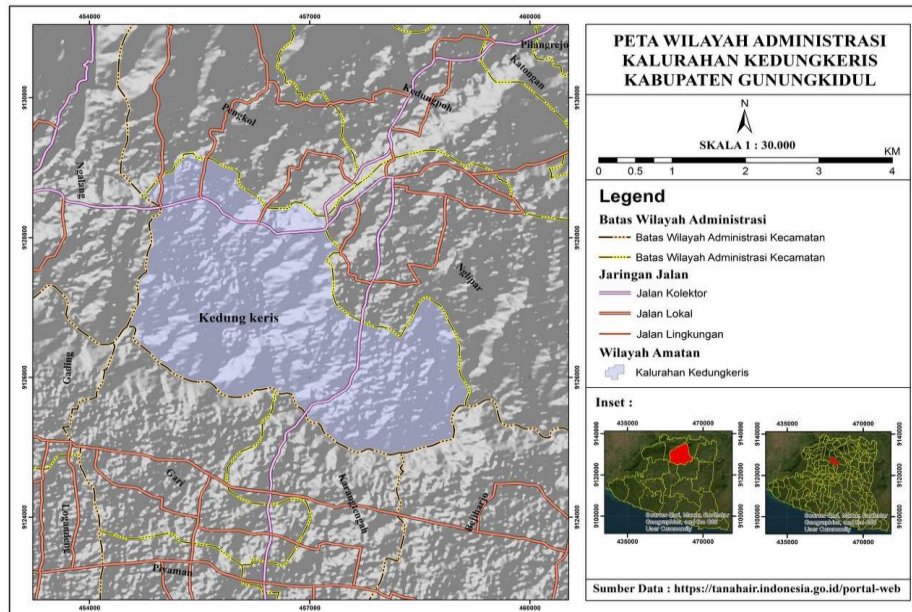
Hampir separuh lebih luas wilayah Kalurahan Kedungkeris merupakan hutan negara, oleh sebab itu, masyarakat sangat menyadari bahwa sangat pentingnya suatu strategi dalam memenuhi kebutuhan hidup dalam jangka waktu yang panjang. Didukung dengan terpeliharanya tanah yang luas yang mampu menghasilkan tanaman pohon kayu yang besar dan banyak seperti pohon jati, mahoni, kayu putih, dan lainnya. Dengan estimasi waktu pertumbuhan yang dibutuhkan kurang lebih 10-20 tahun lamanya untuk pohon kayu dengan potensi utama nilai harga jual tinggi yang tentunya akan sangat membantu kestabilan perekonomian masyarakat untuk generasi selanjutnya.

Melihat dari sisi orbitalnya, Kalurahan Kedungkeris ke Kapanewon memiliki jarak tempuh sejauh 4,1 km atau dalam hitungan waktu sekitar 8 menit. Selanjutnya jika perjalanan tempuh dari Kota Yogyakarta ke Kalurahan Kedungkeris jarak tempuh sejauh 34,5 km dan dalam perkiraan waktu sekitar 56 menit.

Batas Wilayah Kalurahan Kedungkeris antara lain:

- Sebelah Selatan : Sungai Oya, Kalurahan Karang Tengah
- Sebelah Utara : Kalurahan Nglipar dan Kalurahan Pengkol
- Sebelah Barat : Kalurahan Ngalang
- Sebelah Timur : Kalurahan Nglipar

Gambar 2. 1 Peta Wilayah Administrasi Kalurahan Kedungkeris



Sumber: Indonesia Geospasial

Kalurahan Kedungkeris memiliki pemetaan wilayah administrasi yang lumayan luas karena di dalamnya terdapat 7 Padukuhan, 34 Rukun Tetangga (RT), 7 Rukun Warga (RW), yang mana tersebar di setiap wilayah Kalurahan Kedungkeris.

Wilayah Kalurahan Kedungkeris juga memiliki potensi lahan yang luas terlihat dari luasnya hutan negara dan hutan rakyat yang terdapat di Kalurahan Kedungkeris, yang dikelola oleh masyarakat lokal Kalurahan Kedungkeris sebagai salah satu sumber mata pencaharian masyarakat di Kalurahan Kedungkeris.

C. Demografis

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan data terkait dengan jumlah kependudukan yang ada di Kalurahan Kedungkeris telah tercatat bahwa yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 2.404 orang dan laki-laki berjumlah 2.371 orang.

Dengan demikian secara keseluruhan jumlah penduduk Kalurahan Kedungkeris berjumlah 4.775 orang. Oleh sebab itu berdasarkan data yang tercatat jumlah perempuan lebih banyak dari pada jumlah laki-laki, walaupun selisih jumlahnya tidak terlalu jauh. Dengan demikian tercatat jumlah Kepala Keluarga berjumlah 1.577 orang dengan kepadatan penduduk 4 Jiwa/KM². Untuk lebih lanjut disertakan rincian tabel berdasarkan jumlah penduduk Kalurahan Kedungkeris:

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Jumlah Penduduk (orang)	Jumlah KK	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km²)
Perempuan	2.404	4.775	1.577	4
Laki-Laki	2.371			

Sumber: Dukcapil Gunungkidul 2023

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	4.750
2	Kristen	11
3	Katholik	14
4	Hindu	-
5	Buddha	-
6	Konghucu	-
7	Aliran Kepercayaan	-
Total (Orang)		4775

Sumber: Dukcapil Gunungkidul 2023

Berdasarkan data terbaru tahun 2023 Kalurahan Kedungkeris memiliki jumlah penduduk berdasarkan agama, dan hasil menunjukkan

bahwa di Kalurahan Kedungkeris mayoritas masyarakat menganut agama Islam sebanyak 4.750 orang. Hasilnya menunjukkan bahwasanya kualifikasi agama Islam mendominasi, dan mencapai persentase yang lebih tinggi dibandingkan dengan agama-agama lainnya. Fenomena serupa ini bukan hanya terjadi di Kalurahan Kedungkeris, melainkan juga terjadi dalam suatu Negara, dengan kualifikasi mayoritas dan minoritas. Fenomena ini juga dapat diatribusikan pada pertumbuhan populasi umat Islam yang lebih cepat, faktor demografis, serta kecenderungan keluarga yang lebih besar. Analisis ini kemudian dapat memberikan pemahaman yang berharga terkait dengan dinamika demografi agama dalam konteks keberagaman masyarakat dalam suatu Negara maupun Wilayah.

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Rasio Ketergantungan

Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Rasio Ketergantungan

No	Kalurahan	Jumlah Penduduk			Ratio
		Anak	Produktif	Tua	
1.	Kedungkeris	830	3.222	723	48,20

Sumber: Dukcapil Gunungkidul 2023

Berdasarkan data terbaru pada tahun 2023 tentang jumlah penduduk berdasarkan rasio ketergantungan menggambarkan suatu dinamika demografis yang menarik di Kalurahan Kedungkeris, dimana dari analisis rasio ketergantungan mengindikasikan bahwa jumlah penduduk usia produktif jauh lebih tinggi dengan jumlah sebanyak 3.222 orang dibandingkan dengan kelompok lainnya. Kondisi ini memberikan potensi positif terkait pembangunan ekonomi, dengan basis populasi yang lebih

besar untuk berkontribusi dalam sektor produktif. Faktor-faktor seperti peningkatan pendidikan, kesehatan, dan kebijakan keluarga mungkin berperan dalam membentuk struktur demografis yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Analisis ini memberikan landasan penting bagi perencanaan kebijakan yang berfokus pada pemanfaatan potensi ekonomi dari jumlah penduduk usia produktif yang lebih besar.

4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Wajib KTP

Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Wajib KTP

No	Kalurahan	Penduduk			Wajib KTP		
		L	P	JML	L	P	JML
1.	Kedungkeris	2.371	2.404	4.775	1.896	1.932	3.828

Sumber: Dukcapil Gunungkidul 2023

Berdasarkan data terbaru yang didapatkan terkait jumlah penduduk berdasarkan wajib KTP tahun 2023 menunjukkan hasil bahwa jumlah perempuan dalam populasi mengalami peningkatan signifikan dengan jumlah sebanyak 1.932 orang, melebihi jumlah laki-laki. Fenomena ini dapat dipengaruhi oleh perubahan sosial, peningkatan kesadaran gender, dan program-program pemberdayaan perempuan. Dengan jumlah perempuan yang lebih besar yang memiliki KTP, dapat terlihat adanya partisipasi aktif perempuan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Analisis semacam ini memberikan pemahaman lebih lanjut tentang distribusi dan peran gender dalam masyarakat, serta dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang kebijakan yang mendukung kesetaraan dan pemberdayaan perempuan.

5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Akta Kelahiran

Tabel 2. 5 Jumlah Berdasarkan Kepemilikan Akta Kelahiran

No	Kalurahan	PDDK	Memiliki	Belum Memiliki	Persen
1.	Kedungkeris	4.775	2.829	1.946	59,25%

Sumber: Dukcapil Gunungkidul 2023

Berdasarkan data terbaru Kalurahan Kedungkeris dengan analisis berdasarkan akta kelahiran pada tahun 2023 mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk telah memiliki akta kelahiran, dengan jumlah yang lebih besar yaitu sebanyak 2.829 dibandingkan dengan mereka yang belum memiliki sebanyak 1.946. Hal ini mencerminkan tingkat pencatatan kelahiran yang tinggi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan akta kelahiran. Kondisi ini dapat memberikan manfaat signifikan dalam administrasi kependudukan, termasuk akses lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai hak sosial. Analisis semacam ini dapat digunakan untuk merancang kebijakan yang lebih efektif terkait dengan pendaftaran kelahiran, memastikan bahwa seluruh populasi dapat mengakses hak-hak dasar dengan lebih mudah.

6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Tabel 2. 6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Kelompok Umur (Usia)	Laki-laki	Perempuan	Total	Persentase
Usia 0-4 Tahun	23	26	49	1
Usia 5-9 Tahun	148	121	269	6
Usia 10-14 Tahun	160	158	318	7
Usia 15-19 Tahun	158	166	324	7
Usia 20-24 Tahun	178	155	333	7
Usia 25-29 Tahun	221	210	431	9

Kelompok Umur (Usia)	Laki-laki	Perempuan	Total	Persentase
Usia 30-34 Tahun	188	162	350	7
Usia 35-39 Tahun	164	165	329	7
Usia 40-44 Tahun	188	179	367	8
Usia 45-49 Tahun	168	178	346	7
Usia 50-54 Tahun	166	181	347	7
Usia 55-59 Tahun	164	175	339	7
Usia 60-64 Tahun	151	165	316	6
Usia 65-69 Tahun	148	135	283	6
Usia >70 Tahun	222	152	374	8
Jumlah Total	2447	2328	4775	100

Sumber: Profil Kalurahan Kedungkeris 2023

Berdasarkan data terbaru tahun 2023 penduduk terbanyak Kalurahan Kedungkeris berdasarkan faktor usia adalah pada usia 25-29 tahun dengan jumlah sebanyak 431 dengan persentase 9% dan untuk jumlah paling sedikit adalah pada usia 0-4 tahun dengan persentase 1%. Di Kalurahan Kedungkeris dominan lebih banyak jumlah orang dewasa dan orang tua. Dan untuk golongan lansia juga masih tergolong banyak namun tidak sebanyak jumlah remaja/dewasa.

Dalam proses observasi yang dilakukan serta tinjauan lapangan berdasarkan takaran usia tersebut apabila berangkat dari relevansi pelayanan publik di Kalurahan Kedungkeris sangat cenderung mengalami kontradiksi atau ketidakselarasan. Pada umumnya, program Pelayanan Publik di Kalurahan Kedungkeris seharusnya diharapkan mampu melibatkan pemuda dan pemudi di Kalurahan Kedungkeris. Namun, pada kenyataannya SDM yang tersedia di Kalurahan Kedungkeris masih kurang melibatkan muda-mudi setempat.

Sementara, di kalurahan ini, terdapat sejumlah individu dewasa yang memiliki pengalaman dan usia yang lebih besar, namun sayangnya mereka belum terlibat secara aktif dalam sumber daya manusia (SDM) setempat. Sementara itu, kelimpahan anak muda di Kalurahan Kedungkeris menunjukkan potensi energi baru yang belum dimanfaatkan. Situasi ini berpotensi mengakibatkan kurangnya efisiensi dalam pelayanan publik, mengingat pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh para dewasa tersebut belum tersalurkan. Perlu upaya kolaboratif untuk melibatkan seluruh lapisan masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Misalnya dalam pengelolaan media dan informasi pelayanan di Kalurahan Kedungkeris masih belum ada pengelola yang tersedia secara khusus, efektif serta efisien.

7. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Akhir

Tabel 2. 7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Akhir

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Presentase
1	Tidak Sekolah	980	20
2	Tidak Tamat SD	361	7
3	Tamat SD	1201	25
4	Tamat SLTP	1046	21
5	Tamat SLTA	1016	21
6	Diploma I/Diploma II	20	1
7	Diploma III	40	1
8	Strata I	107	2
9	Strata II	3	1
10	Strata III	1	1
Jumlah Total (Orang)		4775	100

Sumber: Dukcapil Gunungkidul 2023

Berdasarkan data di atas, dapat diuraikan dengan persentase bahwa masyarakat di Kalurahan Kedungkeris dominan menempuh pendidikan akhir sebagai tamatan SD dengan memperoleh presentase tertinggi dengan jumlah sebanyak 1.046 orang dengan persentase 21%, yang kemudian disusul sebagai tamatan SLTP dan SLTA dengan jumlah sebanyak 1046 orang dan 1016 orang dengan persentase sama 21%. Kemudian persentase Tidak Tamat SD berada pada 7%, dan Tidak Sekolah berada pada persentase 20%, dan untuk Diploma I/II berada pada persentase 1%, dan untuk Diploma III berada pada persentase 1%, kemudian untuk jenjang pendidikan S1 berada pada 2%, selanjutnya untuk jenjang pendidik S2 berada pada 1%, dan yang terakhir untuk lulusan S3 berada pada persentase 1% dengan jumlah sebanyak 1 orang.

Dengan demikian, mayoritas penduduk Kalurahan Kedungkeris memiliki kualifikasi pendidikan terendah, yaitu tamat SD, sedangkan yang mencapai tingkat pendidikan tertinggi yaitu S3 relatif lebih sedikit. Kesenjangan ini dapat menciptakan tantangan terkait keterbatasan pengetahuan tingkat tinggi dalam komunitas. Terkait dengan patologi birokrasi, kecenderungan ini dapat mengakibatkan terciptanya resiko ketidakseimbangan dalam struktur birokrasi. Kurangnya representasi dari latar belakang pendidikan tinggi dalam pengambilan keputusan bisa menghambat inovasi dan kemajuan dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memastikan keberagaman pendidikan dalam birokrasi demi meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan layanan kepada masyarakat.

8. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 2. 8 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)	Presentase
1	Petani	993	21
2	Wiraswasta	683	14
3	Buruh	323	6
4	Karyawan Swasta	358	7
5	PNS	41	1
6	Pensiunan	28	1
7	Mengurus Rumah Tangga	711	15
8	Perangkat Desa	17	1
9	Tidak Bekerja	864	18
10	Lainnya	757	16
Jumlah Total (Orang)		4775	100

Sumber: Dukcapil Gunungkidul 2023

Berdasarkan tabel di atas tersebut dapat dianalisis bahwa mayoritas mata pencaharian Kalurahan Kedungkeris adalah sebagai Petani berjumlah sebanyak 993 orang dengan persentase 21%. Yang selanjutnya di susul dengan masyarakat yang tidak bekerja sama sekali/menganggur berjumlah sebanyak 864 orang dengan persentase 18%, dan lainnya berjumlah sebanyak 757 orang dengan persentase 16%. Selanjutnya pada posisi keempat pekerjaan sebagai mengurus rumah tangga berjumlah sebanyak 711 orang dengan persentase 15%, kemudian disusul dengan pekerjaan sebagai wiraswasta berjumlah sebanyak 683 orang dengan persentase 14%, kemudian disusul dengan pekerjaan sebagai Karyawan Swasta yang berjumlah sebanyak 358 orang dengan persentase 7%, dan berikutnya pekerja sebagai buruh berjumlah sebanyak 323 orang dengan persentase

6%. Selebihnya bekerja sebagai PNS berjumlah sebanyak 41 orang dengan persentase 1%, dan yang terakhir nominasi pekerjaan paling sedikit adalah sebagai Pensiunan berjumlah sebanyak 28 orang dengan persentase 1%.

Berkaitan dengan itu, mayoritas penduduk Kalurahan Kedungkeris bekerja sebagai petani dengan persentase yang cukup tinggi sedangkan bila diamati jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pekerjaan Lainnya relatif lebih sedikit. Kondisi ini dapat mencerminkan dominasi sektor pertanian dalam struktur ekonomi setempat. Terkait dengan patologi birokrasi, fokus ekonomi yang cenderung pada sektor pertanian dapat menciptakan tantangan dalam pengelolaan pelayanan publik. Mungkin ada kecenderungan untuk kurangnya diversifikasi sumber daya dan prioritas yang diberikan kepada sektor-sektor lain. Oleh karena itu, diperlukan pemikiran strategis dan langkah-langkah untuk menanggulangi patologi birokrasi ini, memastikan pelayanan publik mencakup kebutuhan seluruh komunitas dengan lebih seimbang.

D. Sosial Dan Ekonomi

Kalurahan Kedungkeris, mempunyai keberagaman dalam bidang sosial ekonomi. Dalam sektor sosial ekonomi, masyarakat Kedungkeris memiliki beberapa usaha yang menjadi sumber mata pencaharian utama. Salah satunya adalah usaha ternak, di mana masyarakat lokal aktif dalam beternak hewan seperti sapi, kambing, dan ayam. Usaha ternak ini menjadi sumber pendapatan bagi banyak keluarga di Kalurahan Kedungkeris. Selain itu, sektor pertanian juga menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat. Kedungkeris memiliki lahan pertanian yang subur, yang dimanfaatkan untuk menanam

berbagai jenis tanaman seperti padi, sayuran, dan buah-buahan, serta pohon jati dan pohon kayu lainnya. Pertanian merupakan sektor yang memberikan lapangan kerja serta menyediakan bahan pangan bagi masyarakat setempat.

Selanjutnya, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga memiliki peran penting dalam perekonomian Kalurahan Kedungkeris. Hampir di setiap padukuhan, masyarakat mampu melahirkan kerajinan seperti anyaman bambu, batik, dan pembuatan makanan khas atau kuliner seperti tiwul, bakpia, dan lainnya. UMKM ini memberikan kesempatan kepada ibu rumah tangga dan penduduk setempat untuk memiliki usaha kecil sendiri, sehingga membantu meningkatkan pendapatan rumah tangga dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Secara umum, sosial ekonomi di Kalurahan Kedungkeris, sangat dipengaruhi oleh usaha ternak, pertanian, dan UMKM, yang merupakan sumber pendapatan utama masyarakat setempat. Dengan demikian faktor pendukung potensi di Kalurahan Kedungkeris dengan tersedianya lahan luas yang bisa membantu perekonomian masyarakat. Adapaun luas penggunaan lahan di Kedungkeris sebagai berikut:

Tabel 2. 9 Luas Penggunaan Lahan Kedungkeris

No	Nama lahan	Luas Lahan (Ha)
1	Tanah Sawah	11,0
2	Tanah Kering	274,7
3	Bangunan	172,7
4	Hutan Rakyat	15,0
5	Hutan Negara	438,0
6	Lainnya	105,4
Total Lahan		1.061,8

Sumber: BPS Gunungkidul 2023

Berdasarkan dari berbagai luas lahan di atas tersebut bisa dicermati bahwasanya secara keseluruhan sangat berpotensi dalam bidang pertanian. Pertanian yang kaya akan pemanfaatan luas tanah akan dapat menjadi batu loncatan dalam pengembangan sumber perekonomian dan pendapatan masyarakat dengan pengelolaan lahan, salah satunya dalam pengelolaan pohon jati, dan pohon kayu lainnya, yang dimana nilai jualnya akan sangat tinggi.

E. Sosial Budaya

Sosial Budaya di Kalurahan Kedungkeris sangat terpelihara dan dilestarikan oleh masyarakat dengan baik. Sebab, tidak dapat dipungkiri bahwa dengan sosial budaya maupun kesenian, masyarakat Kalurahan Kedungkeris berusaha agar selalu berbuat baik terhadap sesama dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Seni Budaya masih berlangsung dan masih lestari seperti, Reog Doger, Kethoprak, Jathilan, Karawitan, Wayang, Thoklik, Gejog Lesung dan sebagainya.

Kalurahan Kedungkeris dalam Sosial dan Budaya sudah lumayan lebih baik, dan sudah mencerminkan kehidupan dalam budaya berdesa dengan melahirkan budaya gotong royong, menjaga kelestarian bermasyarakat, serta saling tolong-menolong, dan saat ini Kalurahan Kedungkeris sudah memasuki posisi Rintisan Budaya. Dengan demikian, kehidupan masyarakat Kalurahan Kedungkeris masih tergolong kental dalam nilai-nilai sosial.

F. Sarana dan Prasarana

Secara umum, Kalurahan Kedungkeris sudah tersentuh oleh pembangunan yaitu berupa sarana dan prasarana. Hal demikian dapat

dibuktikan dengan adanya kantor kalurahan yang disertai dengan balai kalurahan. Namun, adanya bangunan kantor kalurahan ini bukanlah merupakan bangunan yang terbaru dan bukan juga bangunan yang sedang dalam proses pembangunan, melainkan sudah berdiri kokoh dan difungsikan. Berangkat pada pembangunan balai pemerintahan secara umum juga sudah terdapat pos ronda dan balai padukuhan yang tersedia dalam setiap lingkungan padukuhan di Kalurahan Kedungkeris.

Selaras dengan itu, dalam pembangunan berupa prasarna komunikasi dan air bersih, saat ini di Kalurahan Kedungkeris masih belum maksimal dan masih belum terlaksana. Penyaluran air bersih skala Kalurahan Kedungkeris masih belum ada, namun, saat ini padukuhan sendowo kidul sudah memiliki PAM air bersih yang disalurkan kepada seluruh warga sendowo kidul, dan dikelola sendiri oleh dukuh dan masyarakat sendowo kidul.

Selaras dengan itu, terkait dalam sarana dan prasarana di Kalurahan Kedungkeris perlu untuk ditindaklanjuti dan melakukan pemerataan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Saat ini yang menjadi potensi unggul di Kalurahan Kedungkeris sebenarnya adalah dalam pengolahan kerajinan dan kuliner. Kerajinan dalam bidang fashion yaitu seni batik, dan kuliner yaitu tiwul, bakpia, dan lainnya yang bisa memperkenalkan ciri khas Kalurahan Kedungkeris. Namun, masih belum ada kebijakan pemerintah dalam memfasilitasi potensi tersebut agar berkembang dan tereksplor ke luar daerah. Sehingga, perlu adanya pengkajian ulang, dan peka dalam memahami potensi lokal saat ini.

G. Pemerintah Kalurahan

Secara umum Kalurahan Kedungkeris memiliki sistem pemerintahan yang dimana terdiri dari pamong kalurahan yaitu Lurah sebagai Kepala Pemerintahan di tingkat Kalurahan, Sekretaris Desa (Carik), dan 16 pamong kalurahan lainnya (perangkat desa), serta mitra pemerintah yaitu Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal). Roda pemerintahan tidak hanya berada dalam lingkungan pamong kalurahan, melainkan juga terdapat lembaga kemasyarakatan yang samapai saat ini aktif dan beroperasi diantaranya seperti, Karangtaruna, Pemeberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), BUMDES, Pengajian, Arisan, Posyandu, Kelompok Tani, Gapoktan, RT dan RW.

Berdasarkan analisis dan proses penelitian di lapangan, pada umumnya keberadaan lembaga pemerintahan tersebut sebenarnya sudah berjalan dengan baik, meskipun sering terkesan kaku, dan terpeleset dalam proses penyelenggaraannya.

Selaras dengan itu, keterkaitan dengan bidang pemerintahan Kalurahan Kedungkeris sebenarnya tidak terdeteksi sangat buruk, namun sering terjadi ketidakstabilan dan kelemahan dalam sistem pemerintahan, yang tentunya akan menciptakan tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal mendasar mengakibatkan terjadinya penyakit birokrasi yang mungkin tercermin dalam lambatnya suatu proses pengambilan keputusan, kurangnya transparansi, dan baru-baru ini terjadi problematik dengan dasar munculnya kecurigaan dalam terjadinya praktik korupsi, serta problematik dalam internal pemerintahan yaitu mood yang naik turun yang berdampak pada melemahnya

tupoksi masing-masing, dan melemahnya fokus dari perangkat pemerintahan karena adanya usaha pribadi yang harus dijalankan yang mengakibatkan ketidak konsistenan dalam bekerja, serta minimnya pemahaman dan pengetahuan dalam suatu lembaga dan organisasi pemerintahan.

Dengan demikian, suatu struktur birokrasi yang tidak efisien dapat menghambat respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat dan menghambat kemajuan. Ketidakstabilan dalam bidang pemerintahan juga dapat mengarah pada kurangnya koordinasi dari antar instansi, menyebabkan ketidakseimbangan dalam sumber daya serta perencanaan yang tidak efektif. Oleh karena itu, diperlukan reformasi birokrasi yang menyeluruh, termasuk penguatan tata kelola, peningkatan kompetensi, dan promosi transparansi, untuk mengatasi patologi birokrasi dan memastikan pelayanan publik yang lebih efisien dan efektif.

Dibawah ini penulis mencantumkan struktur pemerintahan Kalurahan Kedungkeris Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelumnya perlu di ketahui bahwa istilah nama perangkat desa di Yogyakarta berbeda dengan daerah lainnya. Hal demikian terjadi karena berpedoman pada kelembagaan urusan keistimewaan pada pemerintah Kabupaten/Kota Dan Kalurahan.

Tabel 2.10 Struktur Pemerintahan Kalurahan Kedungkeris

No	Nama	SK Pengangkatan	Jabatan
1	Rusdi martona,S.Pd	141/pg/kpts/2013	Lurah (Kepala kalurahan)
2	Rohmat yulianto	14/kpts/2017	Carik (Sekretariat kalurahan)
3	Heri sudiarto	07/kpts/2017	Kasi. pemerintah

No	Nama	SK Pengangkatan	Jabatan
4	Mursidi	07/kpts/2017	Kasi. pembangunan
5	Yeni fatimah	07/kpts/2017	Kaur keuangan
6	Sugiyarti	07/kpts/2017	Kaur.umum
7	Jumbidi	07/kpts/2017	Kaur. perencana
8	Tri handoko	07/kpts/2017	Kasih pelayanan
9	Dalsudi	07/kpts/2017	Dukuh
10	Heri rustanto	07/kpts/2017	Dukuh
11	Nita febli avisa		Dukuh
12	Tri widodo	07/kpts/2017	Dukuh
13	Sumarjo	07/kpts/2017	Dukuh
14	Ahmad mujahidillah	07/kpts/2017	Dukuh
15	Mujiyono	07/kpts/2017	Dukuh
16	Ida yuliana	07/kpts/2017	Staf Perangkat Kal
17	Heni purwandari	07/kpts/2017	Staff Perangkat Kal
18	Rismanto	07kpts/2017	Staff Perangkat Kal

Sumber: Profil Kalurahan Kedungkeris

H. Visi dan Misi

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang secara garis besar mengedepankan kesejahteraan dan kemanusiaan dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan bernegara tentunya tidak terlepas dari suatu pemerintahan yang bekerja untuk rakyat dan dipilih oleh rakyat. Dengan demikian suatu pemerintahan harus memiliki pemahaman tentang organisasi pemerintahan dan kepemimpinan. Yang dimana menjadi acuan dalam menjalankan suatu kebijakan dan program pemerintahan yang mengedepankan hak asasi manusia dalam suatu roda pemerintahan yang mampu meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat, serta

bertanggungjawab dalam suatu pemerinatahan terhadap perkembangan hidup bersama.

Selaras dengan itu, suatu pemerintahan yang berhasil, akan memerlukan visi dan misi yang jelas sebagai batu loncatan untuk mencapai tujuan-tujuan strategis. Visi menentukan arah jangka panjang yang diinginkan oleh pemerintahan, sementara makna misi menggambarkan tindakan konkret yang diambil untuk mencapainya. Dengan demikian, kebijakan pemerintah harus dirancang untuk mencakup seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang paling rentan. Inklusivitas dalam kebijakan dapat memastikan bahwa tidak ada kelompok yang ditinggalkan dan semua warga dapat menikmati manfaat dari suatu pembangunan dengan benar-benar mendasarkan pada keterbukaan dan partisipasi masyarakat Kalurahan Kedungkeris, sehingga dengan demikian merasakan proses yang lebih maju dan terdepan. Oleh sebab itu, di rumuskan sebagai Visi dan Misi Kalurahan Kedungkeris:

1. Visi Kalurahan

“Mewujudkan Desa Kedungkeris Desa Modern dan Berbudaya”.

Makna dari visi “Mewujudkan Desa Kedungkeris Desa Modern dan Berbudaya” yaitu, sebagai berikut:

- a. Pemerintah yang baik mngandung makna terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih bebas dai Koupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sebagai pengayom dan mampu memberikan layanan pada masyarakat.

- b. Modern mengandung makna Pemerintah Desa Kedungkeris menerapkan sistem informasi pemerintahan berbasis teknologi yang disesuaikan dengan era saat ini.
- c. Berbudaya mengandung makna menggambarkan kondisi taraf hidup masyarakat yang masih melestarikan adat istiadat dan kebudayaan peninggalan leluhur yang dilandasi oleh sikap religious, dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi keadilan.

2. Misi Kalurahan

- a. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*) dan bebas dari Koupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- b. Pengembangan kapasitas SDM aparatur desa, lembaga desa, dan masyarakat yang terampil, professional, religious, dan peduli.
- c. Peningkatan fungsi, peran, serta kerjasama perangkat desa dengan lembaga desa.
- d. Peningkatan kualitas pelayanan dan kondisi wilayah yang kondusif.
- e. Optimalisasi pemanfaatan potensi desa.
- f. Menjaga dan melestarika adat istiadat serta seni budaya lokal, peninggalan leluhur.

Pada umumnya apa yang tertuang dalam visi dan misi Kalurahan Kedungkeris sebenarnya sangat baik dan berpotensi untuk meningkatkan semangat dalam kehidupan berdesa. Namun, berdasarkan fakta yang ada Kalurahan Kedungkeris masih jauh dari kata maksimal dalam penerapan Visi dan Misi. Sebagai dasarnya, dapat dilihat dan dinilai dari keberadaan profil kalurahan kedungkeris, sangat minim informasi yang terpublikasikan, data

tidak terupdate, informasi tidak lengkap, dan periode kepemimpinan saat ini juga tidak ada tercantum didalam, bahkan untuk informasi penting lainnya juga tidak tersedia. Sehingga, semua yang terjadi dilapangan mencerminkan kontradiksi dalam pelaksanaanya secara tertulis maupun secara lisan, terkhsusu dalam mewujudkan pembangunan dan desa yang modern, yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada publik masih lemah dan perlu untuk dibenahi. Sehingga, kebijakan yang diberikan oleh PemDes sebenarnya baik namun bertolak belakang pada kehidupan masyarakat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari skripsi ini menggambarkan adanya tantangan serius terkait patologi birokrasi di Kalurahan Kedungkeris. Meskipun secara umum dari hasil wawancara yang dilakukan selama proses penelitian mengarah bahwa pelayanan publik terlihat berjalan dengan baik, namun di sisi lain dalam internal birokrasi menghadapi berbagai gesekan dalam pelaksanaan tupoksi kerja. Ketidaksihesuaian dengan prosedur yang telah ditetapkan mengindikasikan adanya masalah struktural dan koordinasi di setiap unit birokrasi tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti lemahnya kualitas SDM dalam birokrasi Pemerintahan Kalurahan Kedungkeris. Dengan demikian berangkat dari fokus penelitian, peneliti mencoba merangkum kesimpulan secara rinci sebagai berikut:

1. Patologi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Berfokus Pada Standar Pelayanan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara yang dilakukan peneliti selama proses penyusunan skripsi ini, peneliti mengambil kesimpulan bahwa meskipun tidak terdapat indikasi negatif yang signifikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik terkait patologi birokrasi, namun terdapat kelemahan yang patut diperhatikan. Penerapan pelayanan yang berbasis pada standar pelayanan publik masih belum berjalan serta, Pemanfaatan dan pengelolaan teknologi informasi masih lemah, terutama dalam hal penggunaan website sebagai media informasi dan komunikasi

pelayanan. Hal ini akan menghambat percepatan pelayanan dan meningkatkan keterbukaan. Selain itu, proses penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan juga masih belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik. Dengan demikian, menunjukkan perlunya peningkatan dalam implementasi kebijakan dan prosedur guna memastikan pelayanan yang lebih efisien dan berkualitas.

2. Patologi Birokrasi Dalam Internal Pemerintahan yang Berfokus pada Maklumat Pelayanan Dan Kode Etik Lingkungan Pamong Kalurahan

Hasil temuan yang didapatkan peneliti selama melakukan proses penelitian di Kalurahan Kedungkeris menyoroti beberapa permasalahan dalam internal pemerintahan terkait patologi birokrasi. Ketidakmampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara efisien dan efektif menjadi perhatian utama, disebabkan dengan tidak di cantumkannya maklumat pelayanan serta kode etik dalam pelayanan. Lemahnya kompetensi dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) birokrasi pemerintahan juga turut merusak efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Selain itu, kelemahan dalam pengetahuan terkait pengelolaan teknologi informasi memberikan dampak negatif terhadap efisiensi dan kinerja pelayanan. Terakhir, kurangnya komitmen dalam etos kerja juga masih menjadi kendala serius yang perlu diperhatikan untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

3. Patologi Birokrasi Lingkungan Masyarakat yang Berfokus pada Kotak Aduan, Survey Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik

Hasil temuan yang didapatkan peneliti selama melakukan proses penelitian di Kalurahan Kedungkeris patologi birokrasi yang terjadi dalam lingkungan masyarakat dapat dirangkum sebagai ketidaksempurnaan dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta kurangnya interaksi pemerintah dengan masyarakat. Temuan menunjukkan adanya hambatan dalam akses informasi, dengan lambatnya respon terhadap kebutuhan masyarakat, dan kurangnya keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan. Disamping itu, terdapat kecenderungan dugaan terjadinya praktik korupsi (namun masih belum ada bukti konkrit) yang notabene berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. Dengan demikian, perlu langkah-langkah perbaikan yang komprehensif untuk meningkatkan responsivitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan pelayanan publik.

B. Saran

1. Patologi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Yang Berfokus Pada Standar Pelayanan Publik
 - a. Hendaknya mengidentifikasi jenis pelayanan dan produk pelayanan.
 - b. Menyusun rancangan Standar Pelayanan.
 - c. Hendaknya menetapkan dokumen standar pelayanan publik Pemerintah Kalurahan.

2. Patologi Birokrasi Dalam Internal Pemerintahan berfokus pada Maklumat Pelayanan dan Kode Etik
 - a. Menetapkan dan Mempublikasikan Maklumat Pelayanan Pemerintah Kalurahan.
 - b. Menetapkan Kode Etik dan Internalisasi Pelayanan Prima (Keramahtamahan).
3. Patologi Birokrasi Lingkungan Masyarakat berfokus pada Kotak Aduan dan Survey Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kalurahan
 - a. Hendaknya menyediakan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik khusus.
 - b. Membina dan meningkatkan kapasitas petugas yang memberikan pelayanan khusus.
 - c. Survei dilakukan secara langsung setelah pelayanan dilakukan dan/atau survey online lewat website Kalurahan.
 - d. Mengolah data dan merekapitulasi hasil survei.
 - e. Mempublikasikan hasil survei melalui papan pengumuman Kalurahan, website atau sarana informasi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Anggit Saputro, and Permadi Mulajaya. 2022. "Kualitas Pelayanan Administrasi Pada Bagian Tata Usaha Di Kantor Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah." *Jurnal Media Administrasi* 7(1): 49–54.
- Barniat, Zulman. 2019. "Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis Dan Legal." *Analisis Sosial Politik* 5(1): 20–33.
- Emanratu, Pieter Frits. 2020. "GELANGGANG PATRONASE Oleh : Pieter Frits Emanratu (Dosen STIA Saumlaki) ABSTRAK." *Juurnal AdBisPower* 1(1): 48–56.
- Heryanto Monoarfa. 2012. "Efektivitas Dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik: Suatu Tinjauan Kinerja Lembaga Pemerintahan." *Jurnal Pelangi Ilmu* 5(1): 1–9.
- M. Ma'ruf. 2010. "Patologi Birokrasi." *Jurnal Visioner* 4(3): 1–16.
- Marwiyah, Siti. 2023. "Kebijakan Publik Di Negara ASEAN Dalam Mengatasi Korupsi." : 1–313.
- Remaja, Pemahaman et al. 2023. "PROGRAM TERHADAP IMPLEMENTATION OF PROGRAM GENERASI BERENCANA FOR YOUTH UNDERSTANDING IN TEMON DISTRICT , KULON PROGO Pendahuluan Masa Remaja Merupakan Masa Peralihan Dari Kanak-Kanak Ke Masa Dewasa . Keingintahuan Yang Tinggi (Wulandari et Al ., 2023)." 08.
- Silalahi, Cika. 2020. "Patologi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik (Studi Pelayanan Administrasi Kependudukan Kantor Kelurahan Bandar Selamat)."
- Village, Smart, and Berbasis Cloud. 2019. "Pemodelan Aplikasi Mobile." 2(2): 87–95.

Buku:

- Kementrian Ristek dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. (2016). Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi (Ristekdikti 2016).
- Mukarom, Z., & Laksana, M. Wi. (2015). Membangun Kinerja Pelayanan Publik. *Pustaka Setia Bandung*
- Rasyid, M. R. (2007). Makna Pemerintahan. PT. MUTIARA SUMBER WIDYA.

Saiful Arif. (2001). Birokrasi dalam polemik / Moeljarto Tjokrowinoto, dkk. In Saiful Arif (Ed.). [Malang]: Pusat Studi Kewilayahan Universitas Muhammadiyah Malang ; Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001 xiii, 155 p. ; 21cm. .

Website:

<https://jurnal-umsi.ac.id/index.php/jgi/article/download/628/412/1211>

<https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/pegguruan/index>

<https://stianasional.ac.id/wp-content/uploads/2019/05/Birokrasi.pdf>

PANDUAN WAWANCARA

Identitas Informan :
Nama :
Usia :
Tingkat pendidikan :
Kedudukan atau/Jabatan :

A. Pemerintah

1. Bagaimana proses birokrasi PemDes dalam mengurus administrasi desa di Kalurahan Kedungkeris?
2. Bagaimana proses birokrasi PemDes memengaruhi kelancaran dan kecepatan pelayanan publik di Kalurahan Kedungkeris?
3. Apakah terdapat kendala PemDes dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat Kalurahan Kedungkeris?
4. Bagaimana peran teknologi informasi dalam mengurangi birokrasi dan mempercepat proses administrasi di Kalurahan Kedungkeris?
5. Kapan mulai terjadinya permasalahan dalam pelayanan publik di Kalurahan Kedungkeris?
6. mempengaruhi pelayanan publik di tingkat Pemerintahan Kalurahan Kedungkeris?
7. Mengapa patologi birokrasi dapat menjadi penghambat utama dalam efektivitas pelayanan publik di Kalurahan Kedungkeris?
8. Siapa yang terlibat dalam proses pelayanan publik di Kalurahan Kedungkeris?
9. Bagaimana PemDes mengukur dan mengevaluasi efektivitas upaya dalam mengurangi terjadinya birokrasi dalam pelayanan publik?
10. Apa strategi yang dilakukan oleh PemDes untuk mengatasi birokrasi yang lambat dalam pengelolaan pelayanan publik?

B. Masyarakat

1. Siapa yang terlibat langsung dalam penyaluran pelayanan publik terhadap Masyarakat Kalurahan Kedungkeris?

2. Apa saja pelayanan yang diberikan PemDes kepada Masyarakat Kalurahan Kedungkeris?
3. Apakah proses pelayanan yang diberikan oleh PemDes mampu memenuhi kepuasan masyarakat Kalurahan Kedungkeris?
4. Dimana lokasi khusus yang menjadi prioritas PemDes dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kalurahan Kedungkeris?
5. Mengapa pelayanan publik di Kalurahan Kedungkeris perlu disesuaikan dengan kebutuhan khusus masyarakat lokal?
6. Bagaimana PemDes dalam memastikan aksesibilitas dan keterjangkauan pelayanan publik terhadap Masyarakat?
7. Bagaimana teknologi informasi dimanfaatkan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di lingkungan desa?
8. Bagaimana proses jangka waktu dalam pemberian dan penyelesaian pelayanan kepada masyarakat?
9. Apakah ada biaya administrasi yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam proses Pelayanan yang diberikan oleh PemDes?
10. Sejauh mana kinerja PemDes dalam mengelola dan mengevaluasi pelayanan publik di Kalurahan Kedungkeris?

LAMPIRAN



Foto Bersama Lurah
(Bpk. Rusdi Martono, S.Pd)



Foto Bersama Carik
(Bpk. Rahmat Yulyanto)



Foto Bersama BPD
(Bpk. Suharto)



Foto Bersama Jagabaya, Tata Laksana,
Staff Kamituwo, Dukuh



Foto Bersama Karangtaruna



Foto Bersama Masyarakat



Foto Bersama Masyarakat



Foto Bersama Masyarakat



Foto Bersama Masyarakat



Foto Bersama Masyarakat



Foto Penelitian I



Foto Penelitian II